

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perusahaan di Indonesia semakin berkembang dengan pesat setiap tahunnya. Bertambah banyaknya perusahaan di Indonesia sehingga mengakibatkan terjadinya persaingan antar perusahaan. Adanya persaingan dalam bisnis merupakan suatu hal yang wajar. Dengan adanya persaingan, dapat memotivasi suatu perusahaan untuk terus berinovasi dan berkembang. Namun, persaingan juga dapat mengintimidasi suatu perusahaan. Maka dari itu, perusahaan harus dapat mempertahankan perusahaannya dari berbagai macam masalah dan tantangan.

Permasalahan yang sering terjadi dalam perusahaan adalah *financial distress* atau kesulitan keuangan. *Financial distress* adalah suatu kondisi ketika perusahaan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya, sehingga berakibat dapat menurunkan tingkat profitabilitas suatu perusahaan. Beberapa perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan perusahaannya dan pada akhirnya mengalami *financial distress* bahkan hingga kebangkrutan.

Salah satu perusahaan yang mengalami *financial distress* adalah PT Sri Rejeki Isman atau Sritex. Pada tahun 2022, Sritex memiliki ekuitas negatif yang disebabkan dari jumlah utang yang lebih besar dari aset yang dimiliki. Hal ini sangat berisiko bagi perusahaan karena dapat menyebabkan kebangkrutan. Total liabilitas PT Sri Rejeki Isman hingga september 2022 tercatat sejumlah US\$1,6 miliar atau setara dengan Rp24,66 triliun. Liabilitas yang dimiliki Sritex terdiri dari utang bank jangka pendek sejumlah US\$32,8 juta atau Rp508,47 miliar. Kemudian utang bank dan obligasi dengan jatuh tempo kurang setahun sejumlah US\$4,05 juta atau Rp62,774 miliar. Berikutnya utang bank dan obligasi jangka panjang sejumlah US\$1,33 miliar atau Rp20,57 triliun, sehingga total utang bank dan obligasi sejumlah US\$1,36 miliar atau Rp21,14 triliun. Akibat adanya liabilitas yang terlalu besar maka sejak 18 Mei 2021 PT Sri Rejeki Isman mengalami suspensi oleh Bursa

Efek Indonesia. Masa suspensi ini selama 24 bulan hingga pada tanggal 18 Mei 2023, sehingga perusahaan berpotensi *delisting* dari Bursa Efek Indonesia.

Pada tanggal 17 Maret 2023, PT Sri Rejeki Isman mengambil langkah untuk memberhentikan seluruh dewan direksi dan komisaris lama serta melakukan perubahan susunan direksi dan dewan komisaris. Perubahan tata kelola ini bertujuan sebagai salah satu upaya dalam mengatasi masalah. Dengan adanya penerapan tata kelola yang baik diyakini dapat meningkatkan kinerja perusahaan.

Financial distress merupakan keadaan sebelum perusahaan mengalami kebangkrutan. Analisis *financial distress* dapat digunakan sebagai indikasi bagi perusahaan sebelum mengalami kebangkrutan. Tanda-tanda adanya *financial distress* biasanya dapat dilihat melalui kemampuan likuiditas yang rendah, ketidakmampuan perusahaan dalam membayar kewajiban, serta kinerja perusahaan yang semakin menurun.

Faktor yang dapat mendorong suatu perusahaan mengalami *financial distress* dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik faktor keuangan maupun non keuangan. Faktor keuangan yang menyebabkan perusahaan mengalami *financial distress* seperti besarnya jumlah kewajiban yang harus dibayarkan. Sedangkan faktor non keuangan yang menyebabkan *financial distress* yaitu seperti tata kelola perusahaan yang kurang baik. Kondisi *financial distress* dapat diukur dari tata kelola perusahaannya (*corporate governance*). Faktanya *financial distress* tidak hanya karena ketidakmampuan membayar kewajiban, namun juga disebabkan oleh kegagalan penerapan *corporate governance*. Salah satu elemen penting dalam suatu perusahaan yaitu penerapan *corporate governance*. Menurut teori keagenan, keseimbangan kepentingan pihak agen dan prinsipal dalam perusahaan akan mempengaruhi pelaksanaan *corporate governance*. Dengan adanya penerapan *corporate governance* yang optimal maka akan meningkatkan kinerja keuangan dan dapat meminimalisir terjadinya *financial distress*.

Menurut Widhiastuti (2019) *corporate governance* merupakan sebuah aturan yang mengatur hubungan antara pihak internal dengan eksternal perusahaan,

serta mengatur dan mengendalikan operasional perusahaan. Jika perusahaan menerapkan *corporate governance* dengan baik, maka dapat meningkatkan kepercayaan dari pihak eksternal. Ketika perusahaan sudah mendapatkan kepercayaan dari investor maka, investor tidak akan segan untuk menanamkan sejumlah uangnya. Hal ini dapat menghindarkan perusahaan dari kesulitan keuangan. Dalam Kep-339/BEJ/07-2001 Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta, menjelaskan bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang baik, perusahaan wajib memiliki komisaris independen, komite audit, dan sekretaris perusahaan.

Corporate governance diukur menggunakan indikator mekanisme *corporate governance* yaitu kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan direksi, komisaris independen, dan komite audit. Kepemilikan institusional merupakan jumlah proporsi saham yang dimiliki oleh institusi. Semakin besar kepemilikan institusional pada suatu perusahaan maka pengawasan perusahaan akan semakin ketat sehingga kinerja perusahaan menjadi baik dan perusahaan dapat terhindar dari financial distress. Kepemilikan institusional dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan. Kepemilikan manajerial merupakan besarnya proporsi kepemilikan perusahaan yang dimiliki oleh manajemen perusahaan. Semakin besar tingkat kepemilikan manajerial maka dapat meminimalisir suatu perusahaan mengalami *financial distress*. Dalam struktur dewan, dewan direksi adalah pihak yang memiliki kekuasaan dalam menentukan kebijakan dan strategi perusahaan. Semakin banyak jumlah dewan direksi dalam suatu perusahaan akan mempengaruhi pola koordinasi dan komunikasi sehingga berakibat pada kurang optimalnya keputusan yang diambil, karena seluruh keputusan yang dibuat oleh dewan direksi dapat mempengaruhi kondisi perusahaan. Melalui pengawasan oleh komisaris independen dapat meningkatkan keefektifan peran dewan dalam suatu perusahaan. Komisaris independen akan melakukan pengawasan pengambilan keputusan manajemen agar keputusan yang diambil tepat dan menjauhkan perusahaan dari financial distress. Komite audit berfungsi untuk membantu pengawasan pelaksanaan perusahaan, laporan keuangan perusahaan serta pelaksanaan tata kelola perusahaan. Komite audit dapat dijadikan

parameter tata kelola perusahaan, hal ini dapat mengurangi konflik keagenan dan meminimalkan kemungkinan perusahaan mengalami financial distress.

Penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Mananl & Hasnawati (2022) menyatakan bahwa kepemilikan perusahaan, kepemilikan manajerial, dan ukuran dewan direksi memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap financial distress, sedangkan ukuran dewan pengawas, anggota komite audit dan ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap *financial distress*. Menurut penelitian Yuliani & Rahmatiasari (2021) kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan komisaris independen memiliki pengaruh positif signifikan, namun dewan direksi dan dewan komisaris memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap *financial distress*. Berbeda dengan hasil yang diperoleh Damayanti & Kusumaningtias (2020) yaitu direktur independen dan komite audit memiliki pengaruh positif terhadap *financial distress*, sedangkan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *financial distress*. Sedangkan hasil penelitian Nilasari (2021) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional memiliki pengaruh signifikan terhadap kondisi *financial distress*. Penelitian Nasiroh & Priyadi (2018) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap *financial distress*. Dewan direksi dan dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap *financial distress*, sedangkan komite audit berpengaruh positif terhadap *financial distress*. Berdasarkan hasil akhir penelitian-penelitian terdahulu ditemukan adanya inkonsistensi. Oleh karena itu peneliti ingin melakukan penelitian lanjutan guna menguji teori dari hasil penelitian sebelumnya.

Pada tahun 2023, perusahaan pada sektor barang konsumen non-primer masih mengalami pergerakan sektoral yang merah, sehingga sektor mendominasi papan pemantauan khusus oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). Terdapat 153 saham yang tercantum dalam papan pemantauan khusus. Dari sektor barang konsumen non-primer terdapat 42 emiten atau sekitar 27,5% dari total daftar pemantauan khusus saat ini. Oleh karena itu, peneliti ingin melakukan penelitian pada sektor barang konsumen non-primer karena sektor ini sedang mengalami paling banyak penurunan. Penelitian ini dilakukan pada periode 2020-2022 pada perusahaan

sektor barang konsumen non-primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Adapun indikator *corporate governance* yang digunakan oleh peneliti adalah kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan direksi, komisaris independen, dan komite audit.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *financial distress* pada perusahaan sektor barang konsumen non-primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022?
2. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *financial distress* pada perusahaan sektor barang konsumen non-primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022?
3. Apakah jumlah dewan direksi berpengaruh terhadap *financial distress* pada perusahaan sektor barang konsumen non-primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022?
4. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *financial distress* pada perusahaan sektor barang konsumen non-primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022?
5. Apakah komite audit berpengaruh terhadap *financial distress* pada perusahaan sektor barang konsumen non-primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris tentang pengaruh *corporate governance* terhadap *financial distress* pada perusahaan sektor barang konsumen non primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk

penelitian selanjutnya serta dapat menjadi bukti empiris terkait pengaruh *corporate governance* terhadap *financial distress*.

2. Manfaat Praktik

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perusahaan - perusahaan di Indonesia sebagai bahan pertimbangan dalam mencegah masalah *financial distress*.

3. Manfaat bagi perusahaan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam mengambil keputusan, serta dapat mencegah terjadinya *financial distress*.

1.5. Sistematika Penulisan

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II

**FINANCIAL DISTRESS, CORPORATE GOVERNANCE
DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

Bab ini akan memaparkan teori yang mendukung penelitian yaitu teori keagenan, *financial distress*, *corporate governance*, penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis, serta kerangka pemikiran.

BAB III

METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri dari jenis penelitian, objek penelitian, sampel dan teknik pengambilan sampel, definisi operasional dan pengukuran variabel, jenis dan teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV

ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan memaparkan penjelasan mengenai analisa data dan hasil pembahasan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan serta saran bagi penelitian selanjutnya.

